

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA RANTAU BARU KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh

Nur M. Alfa Zikri dan Nurman

Mahasiswa dan Dosen Ilmu Administrasi Fisipol UIR

Abstract

The research aims to determine the level of rural finance management of Rantau Baru Subdistrict Pangkalan Kerinci District of Pelalawan. The assessment indicators used include of acceptance administration, expenses administration and financial accountability. Type of research is located in the rural office of Rantau Baru Subdistrict Pangkalan Kerinci District of Pelalawan. This is a descriptive survey that takes questionnaire priority as data collection and it can be used to analyze the empirical condition objectivity in the location of the research. The populations of the research consists of 17 employees. The sampling technique that used in determining the individual sample is census techniques for employees. Techniques to collect the data consist of used consist of primary data, collected by questionnaire techniques, interviews and secondary data collected using observation. While the data analysis technique used is to use a frequency table. Based on this analysis technique researchers assess and conclude that Analysis Financial Management of Rantau Baru Subdistrict Pangkalan Kerinci District of Pelalawan is in the interval good quite assessment. Recommendations to be considered especially with respecting to the recording of all revenues and expenditures in apbdes to be more attention to improve the effectiveness of the rural financial management.

Key words: Management, Rural Finance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses Administrasi dimaknai sebagai pola pemikiran dan rangkaian kegiatan untuk pencapaian suatu hasil tertentu dengan profesional sesuai tuntutan kegiatan yang harus dilakukan, sehingga hasil yang diinginkan terwujud. Administrasi berfungsi untuk menemukan pembagian kerja dalam bermacam-macam

karakteristik manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah. Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam

pasal 206 yaitu mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut:

1. pengaturannya kepada desa.
2. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah/kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa Rantau Baru merupakan desa yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Desa Sekijang Dan Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan Desa Rantau Baru nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) pada tahun 2013 Desa Rantau Baru mendapatkan anggaran sebesar Rp831.199.820,00. Yang mana anggaran ini didapatkan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp331.199.820,00 dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten sebesar Rp500.000.000,00 melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK) Mandiri.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2013 pekerjaan PPIDK Mandiri dikerjakan dan dipantau masyarakat, sehingga dapat

langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Tujuan program PPIDK Mandiri ini untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintah yang baik atau good governance dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan yang dilakukan melalui swadaya masyarakat.

Berdasarkan APBDes desa Rantau Baru tahun 2013 ada beberapakegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Rantau Baru, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa
2. Peningkatan pelayanan BPD
3. Peningkatan pelayanan LKMD
4. Peningkatan pelayanan PKK
5. Peningkatan Pelayanan Karang Taruna
6. Penigkatan pelayanan PAUD
7. Peningkatan Pelayanan Posyandu
8. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa
9. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
10. Peningkatan Wawasan Aparatur Desa
11. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Bidang Tilawatil Qur'an
12. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa
13. Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana
14. Penimbunan Jalan Sepanjang 600 Meter, Program PPIDK Mandiri.

Berikut ini adalah tabel ringkasan anggaran pendapatan belanja, pembiayaan desa. Desa Rantau Baru tahun 2013 :

Tabel 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja, Pembiayaan Desa

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DESA		FORMULIR DPA
DESA RANTAU BARU KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2013		
Urusan Pemerintah : 1.20 Pemerintahan Umum Organisasi : 1.20.1.20.01 Desa Rantau Baru		
Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja, Pembiayaan Desa		
Kode rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN DESA	831.199.820
1 4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Alokasi Dana Desa	
1 4 1	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten	331.199.820
1 5	PPIDK Mandiri	
	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	
1 5 3 02	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000
1 7	BELANJA DESA	831.199.820
	Belanja Tidak Langsung	
2	Honorarium TPAPD	831.199.820
2 1	Belanja Langsung	74.400.000
2 1 1	Belanja Pegawai	74.400.000
2 2	Belanja Barang Dan Jasa	756.799.820
2 2 1	Belanja Modal	73.900.000
2 2 2	Belanja Pemerintah Kab. Pelalawan	91.000.000
2 2 3	JUMLAH BELANJA	91.899.820
2 2 4	Surplus (Defisit)	500.000.000
		831.199.820
	Penerimaan Pembiayaan Desa	
	Jumlah Penerimaan Desa	
3 1	Pengeluaran Pembiayaan Desa	
	JUMLAH PENGELUARAN DESA	
3 2	JUMLAH PEMBIAYAAN	

Sumber : APBDes Desa Rantau Baru 2013

Permasalahan mengenai penggunaan APBDes Desa Rantau Baru ada pada perehapan dermaga. Dimana anggarannya

ada namun pelaksanaannya tidak ada. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Per Kegiatan Desa

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA					FORMULIR DPA 3
DESA RANTAU BARU KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2013					
Urusan Pemerintahan	: 1.20	Pemerintah Umum			
Organisasi	: 1.20.1.20.01	Desa Rantau Baru			
Program	: 1.20.1.20.01.28	Prog. Peningkatan Sarana Dan Prasarana			
Kegiatan	: 1.20.1.20.01.28.001	Pemb. Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana			
Lokasi Kegiatan					
Jumlah Tahun N-1	:				
Jumlah Tahun N	: Rp. 91.899.920,-				
Jumlah Tahun N+1	:				
Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Meningkatkan Sarana Dan Prasarana			
Masukan		Dana			
Keluaran		Tersedianya Sarana Dan Prasarana			
Hasil		Meningkatkan Pelayanan Masyarakat			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Dan Masyarakat Desa					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Per Kegiatan Desa					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
223	Belanja Modal				
22307	Pemeliharaan Kantor Desa	1	Paket	5.000.000	5.000.000
22308	Pengadaan Laptop Desa	1	Paket	3.000.000	3.000.000
22317	Perehapan Dermaga	1	Unit	10.000.000	10.000.000
22319	Pemb. Posyandu 4x4	1	Unit	16.000.000	16.000.000
22322	Pembuatan Gedung PKK	1	Paket	25.799.820	25.799.820
22324	Penimbunan Tanah Halaman Kantor Desa	1	Unit	15.000.000	15.000.000
22330	Biaya Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa				
	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Paket	1.500.000	1.500.000

22331	Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Pengadaan Sampan Robin SD	1	Paket	3.600.000	3.600.000
		1	Paket	7.000.000	7.000.000
Jumlah					91.899.820

Sumber : APBDes Desa Rantau Baru 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana desa Rantau Baru adalah Rp91.899.820 yaitu untuk Pemeliharaan Kantor Desa, Pengadaan Laptop Desa, Perekahan Dermaga, Pembangunan Pos Yandu 4x4, Pembuatan Gedung PKK, Penimbunan Tanah Halaman Kantor Desa, Biaya Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengadaan Sampan Robin SD.

Penulis melihat adanya permasalahan yang terdapat dalam penggunaan APBDes desa Rantau Baru tahun 2013. Yaitu pada perekahan dermaga, padahal anggarannya ada dan telah di sahkan dalam APBDes namun tidak dilaksanakan pembangunannya. Dalam APBDes 2013 untuk perekahan dermaga di tulis anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.

Selain itu permasalahan mengenai pelaksanaan administrasi APBDes yaitu pada Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Kelurahan Mandiri atau disingkat PPIDK Mandiri. Adapun anggarannya sebesar Rp. 500.000.000,- telah digunakan untuk penimbunan jalan sepanjang 600 meter. Namun penggunaan anggaran PPIDK Mandiri tersebut tidak dijelaskan secara rinci pada APBDes 2013. PPIDK Mandiri merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa Rantau Baru pada tahun 2013. Seharusnya semua

pendapatan desa yang berbentuk uang harus dimasukkan kedalam APBDes dan dapat dipertanggung jawabkan baik penerimaan maupun pengeluarannya. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 07 Tahun 2013.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan "Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan".

Kegunaan Penelitian

- Guna teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang Administrasi Negara.
- Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat di desa Rantau Baru dalam melaksanakan pembangunan.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi.

Administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti: Dalam arti sempit: administrasi adalah kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha. Dalam arti luas: administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulumenurut R.D.H. Kusumaatmadja (dalam Ragawino, 2006:18).

Sementara J.Wajong Ragawino (2006:18) adminisitrasi sama dengan

Ditinjau dari segi perkembangannya, administrasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Administrasi Negara
2. Administrasi Niaga

Berdasarkan pendapat para ahli diatas penulis menarik kesimpulan bahwa adminstrasi dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama atau kegiatan-kegiatan tertentu yang terarah dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2003:2).

Adapun yang menjadi fungsi manajemen menurut Hendri Fayol (dalam Harahap, 2004:5):

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (pengorganisasian)
- c. Commanding (pemberian komando)

pengendalian atau memerintah (*to direct, to manage, bestaken, be wind voeren atau beheren*) yang merupakan suatu proses yang meliputi :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan politik pemerintah(*Formulation of Policy*).
- b. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara
- c. 1) Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan
2) Memimpin Organisasi agar tercapai tujuan.
- d. Coordinating (pengkooordinasi), dan
- e. Controlling (pengawasn)

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2002:3) manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan penentuan dan pelaksanaan aktivitas, *policy*, dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi.

Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik

dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Konsep Kepemimpinan

Sehubungan dengan luasnya kegiatan manusia modern pada zaman sekarang, dirasakan perlu adanya pemimpin-pemimpin yang efektif dan baik perkertinya, menurut Kartono (2008:94) mengemukakan terdapat tiga azas kepemimpinan ialah :

1. Kemanusiaan, mengutamakan sifat-sifat kepemimpinan yaitu pembimbingan manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan human
2. Efisien, efisien teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber, materi, dan jumlah manusia atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis, serta azas-azas manajemen modern
3. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi.

Seorang yang menduduki jabatan pimpinan mempunyai kapasitas untuk membaca situasi yang dihadapinya secara tepat dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar sesuai dengan

tuntutan situasi yang dihadapinya, logis karena penyesuaian yang perlu dilakukan menyangkut perubahan dari satu tipe ke tipe yang lain.

Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya, seperti yang dikemukakan Nawawi dan M. Martini Hadari (2006:74).

Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 07 Tahun 2013 bahwa :

1. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dari perangkat desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui bendahara desa.
3. Bendahara desa membuat catatan mengenai pos-pos anggaran penerimaan dan pengeluaran yang tersebut dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, antara lain :
 - a. Penatausahaan Penerimaan
 - b. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa
 - c. Penatausahaan penerimaan menggunakan:
 - d. Buku kas umum
 - e. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan
 - f. Buku kas harian pembantu
4. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
5. Laporan pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana yang

dimaksud dalam angka (3) diatas,
dilampiri dengan :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah
- d. Penatausahaan Pengeluaran
 1. Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa
 2. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 3. Pengajuan SPP dilampiri dengan rincian penggunaan dana
 4. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas, harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
 5. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum

- b. Buku kas pembantu
- c. Buku kas harian pembantu
- a. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
 1. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kepala desa dan memberikan tembusan kepada camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 2. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka(1) harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara.
 3. Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a) ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Desa

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3 : Operasionalisasi Variabel Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub-indikator	Skala
1	2	3	4	5
Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didas arkan atas rasion alitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003; 2)	Pengelolaan Keuangan Desa	a. Penatausahaan Penerimaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa 2. Penatausahaan Penerimaan menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan c. Buku kas harian pembantu 3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawab an penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 4. Laporan pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam angka (3) diatas, dilampiri dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan c. Bukti penerimaan lainnya yang sah 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		b. Penatausahaan pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa melalui surat permintaan pembayaran (SPP) 2. Pengajuan SPP dilampiri dengan rincian penggunaan dana 3. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas, harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 4. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu c. Buku kas harian pembantu 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

		c. Pertanggungjawaban penggunaan dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kepala desa dan memberikan tembusan kepada camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 2. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka(1) harus dilampirkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara. 3. Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a) ditutup oleh bendahara desa setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan kepala desa. 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
--	--	---------------------------------------	--	--

Sumber : Data Olahan Penulis 2014

Teknik Pengukuran

Baik : Apabila 66-100% dari seluruh indikator Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Cukup Baik : Apabila 34-66% dari seluruh indikator Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Kurang Baik : Apabila 1-33% dari seluruh indikator Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah Survey Deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dengan menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu : Kepala desa Rantau Baru, sekretaris desa, bendahara desa, BPD 5 orang, PTPKB 1 orang, LKMD 5 orang, Kepala BPMPD, Kaur Kesra dan Kaur Pemerintahan.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dengan cara wawancara maupun observasi. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah data mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau dari laporan-laporan tertulis. Data sekunder yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari kantor desa Rantau Baru yang berhubungan atau yang berkaitan dengan penelitian ini secara seperti: Gambaran mengenai APBDes, Struktur organisasi Kantor desa Rantau Baru, Gambaran umum desa Rantau Baru

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2007:30).
- b. Wawancara (*Interview*) adalah mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informen, melalui daftar pertanyaan yang telah disediakan.
- c. Angket (*Quisioner*) adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk

diisi oleh responden, beberapa daftar pertanyaan tertulis dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang objek penelitian peneliti.

PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Pembangunan Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh Pemerintah Desa sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di desa dan sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mampu untuk mengelola keuangan desa dengan baik demi tercapainya tujuan pembangunan desa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 07 Tahun 2013 bahwa Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dari perangkat desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui bendahara desa. Bendahara desa membuat catatan mengenai pos-pos anggaran penerimaan dan pengeluaran yang tersebut dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Antara lain:

1. Penatausahaan Penerimaan

Penatausahaan Penerimaan meliputi :

- a. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa

- b. Penatausahaan penerimaan menggunakan:
1. Buku kas umum
 2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan
 3. Buku kas harian pembantu
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- d. Laporan pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam angka (3) diatas, dilampiri dengan :
1. Buku kas umum
 2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan

Tabel 4: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Penatausahaan Penerimaan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa	10 (58,82%)	7 (41,17%)	- -	17
2	Penatausahaan penerimaan menggunakan Buku kas umum	11 (64,70%)	6 (35,29%)	- -	17
3	Penatausahaan penerimaan menggunakan Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan	7 (41,17%)	10 (58,82%)	- -	17
4	Penatausahaan penerimaan menggunakan Buku kas harian pembantu	6 (35,29%)	11 (64,70%)	- -	17
5	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	5 (29,41%)	9 (52,94%)	3 (17,64%)	17
6	Laporan pertanggung jawaban penerimaan, dilampiri dengan : Buku kas umum Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan Bukti penerimaan lainnya yang sah	3 (17,64%)	14 (82,35%)	- -	17
Jumlah		42	57	3	102
Rata-rata		7	9	1	17
Persentase		41,17%	52,94%	5,88%	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa penatausahaan penerimaan terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Rantau Baru berjalan dengan cukup baik. Dengan jumlah 57 jawabandan rata-rata 9 atau 52,94% dari responden menjawab cukup baik. Sementara itu 42 jawaban responden untuk kategori baik. Hanya 3 responden yang menjawab kurangbaik. Adapun faktor yang mempengaruhi responden menjawab kurang baik pada indicator bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawab melalui laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bendahara desa Rantau Baru yaitu Bapak Erwanto, Bapak Erwanto mengatakan:“Dalam penerimaan keuangan desa itu terdiri dari tiga tahap. Setiap tahap terdiri dari empat bulan. Artinya penerimaan tidak dilakukan setiap bulan tetapi hanya empat bulan sekali. Sehingga kami pun menerima honor juga empat bulan sekali”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan penerimaan dalam pengelolaan keuangan desa Rantau Baru sudah berjalan dengan

cukup baik. Oleh karena itu, pemerintah desa harus meningkatkan pengelolaan keuangan desa ini. Terutama kerjasama antara bendahara desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sehingga terciptalah pengelolaan keuangan desa yang baik.

2. Penatausahaan Pengeluaran

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pegawai yang berjumlah 17 orang responden terhadap indikator penatausahaan pengeluaran yang terdiri dari lima item yang dinilai yaitu Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa, Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pengajuan SPP dilampiri dengan rincian penggunaan dana, Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: Buku kas umum, Buku kas pembantu, Buku kas harian pembantu, dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 : DistribusiTanggapanRespondenMengenaiIndikatorPenatausahaan Pengeluaran terhadapPengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru

No	Item Yang Dinilai	KategoriPenilaian			Jumlah
		Baik	CukupBaik	KurangBaik	
1	Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa	6 (35,29%)	11 (64,70%)	- -	17
2	Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	5 (29,41%)	12 (70,28%)	- -	17

3	Pengajuan SPP dilampiri dengan incian penggunaan dana	6 (35,29%)	9 (52,94%)	2 (11,76%)	17
4	Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	8 (47,05%)	9 (52,94%)	- -	17
5	Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: Buku kas umum Buku kas pembantu Buku kas harian pembantu	8 (47,05%)	7 (41,17%)	2 (11,76%)	
Jumlah		33	48	4	85
Rata-rata		7	9	1	17
Persentase		41,17%	52,94%	5,88%	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5. dapat dijelaskan bahwa penatausahaan pengeluaran terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Rantau Baru berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan rata-rata jawaban responden terhadap seluruh indikator penatausahaan pengeluaran. Dengan jumlah 48 dan rata-rata 9 atau 52,94% dari responden menjawab cukup baik. Sementara itu 33 jawaban responden untuk kategori baik. Hanya 4 responden yang menjawab kurang baik. Adapun faktor yang mempengaruhi responden menjawab kurang baik pada indikator Pengajuan SPP dilampiri dengan rincian penggunaan dana dan Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: Buku kas umum, Buku kas pembantu, Buku kas harian pembantu. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa Rantau Baru Bapak Erwanto, mengatakan:

“Untuk rincian penggunaan dana sebenarnya sudah ada dan sudah dilampirkan dalam SPP, namun masih

ada kesalahan-kesalahan kecil dalam penulisannya”.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan pengeluaran sudah berjalan cukup baik akan tetapi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah desa dalam penatausahaan pengeluaran. Terutama masalah penulisan rincian penggunaan dana pemerintah desa harus memperhatikan lebih detail terhadap penulisan karena ini menyangkut masalah anggaran.

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pegawai yang berjumlah 17 orang responden terhadap indikator Pertanggungjawaban penggunaan dana yang terdiri dari lima item yang dinilai yaitu Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kepala desa dan memberikan tembusan

kepada camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan Buku kas umum, Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti

pengeluaran yang sah, Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara, Buku kas umum ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Desa dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 6: Distribusi Tanggapan Responden Indikator Pertanggungjawaban Penggunaan Dana terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kepala desa dan memberikan tembusan kepada camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	3 (17,64%)	6 (35,29%)	8 (47,05%)	17
2	Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan Buku kas umum	8 (47,05%)	9 (52,94%)	- -	17
3	Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.	5 (29,41%)	9 (52,94%)	3 (17,64%)	17
4	Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan Dengan Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara.	7 (41,17%)	8 (47,05%)	2 (11,76%)	17
5	Buku kas umum ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Desa	1 (5,88%)	6 (35,29%)	10 (58,82%)	17
Jumlah		24	38	23	51
Rata-rata		5	8	4	17
Persentase		29,41%	47,05%	23,52%	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 6. dapat diketahui bahwa jawaban dari 17 responden untuk indikator

pertanggungjawaban penggunaan dana 29,41% menjawab baik, 47,05%

menjawab cukup baik dan 23,52% menjawab kurang baik. Artinya untuk indikator pertanggungjawaban penggunaan dana ini berjalan cukup baik. Akan tetapi masih ada responden yang menjawab kurang baik pada beberapa indikator. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan dana yang hanya empat bulan

sekali sehingga mempengaruhi jawaban responden terhadap indikator yang pertama dan keempat.

Selanjutnya untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7: Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Penatausahaan Penerimaan	7 (41,17%)	9 (52,94%)	1 (5,88%)	17
2	Penatausahaan Pengeluaran	7 (41,17%)	9 (52,94%)	1 (5,88%)	17
3	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	5 (29,41%)	8 (47,05%)	4 (23,52%)	17
Jumlah		19	26	6	51
Rata-rata		6	9	2	17
Persentase		35,29%	52,94%	11,76%	100%

Sumber : Data Olahan 2014.

Dari data tabel rekapitulasi tanggapan responden terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, responden yang menjawab baik ada 6 orang (35,29%), responden yang menjawab cukup baik ada 9 orang (52,94%) sedangkan responden yang menjawab kurang baik ada 2 orang (11,76%). Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini dikategorikan cukup baik. Sesuai dengan penjelasan pada bab II bahwa persentase sebesar 34%-66% masuk kedalam kategori cukup baik. Artinya pengelolaan keuangan desa di desa Rantau Baru masih jauh dari kata baik. Karena ada sembilan responden yang menjawab cukup baik dan dua responden yang menjawab kurang baik.

Hanya enam responden yang menjawab baik. Oleh karena itu, pemerintah desa Rantau Baru harus meningkatkan pengelolaan keuangan desa mereka. Dari yang kurang baik menjadi cukup baik dan dari yang cukup baik menjadi baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis pengelolaan keuangan desa Rantau Baru masih belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat kesalahan dalam pencatatan penggunaan dana desa. Hal ini dapat dilihat pada data yang penulis peroleh bahwa penggunaan dana sebesar Rp. 500 juta tidak di tulis rincian pengeluarannya. Menurut penulis ada dua hal yang sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa Rantau Baru yang pertama adalah tingkat pendidikan pegawai dan yang kedua adalah umur

pegawai. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian bahwa lebih dari 60% pegawai kantor desa yang penulis jadikan sebagai responden tidak tamat SLTA. Rinciannya adalah dari 17 responden 6 orang tamat SD dan 5 orang tamat SLTP, sisanya 3 orang tamat SLTA, 1 orang D3 dan 2 orang S1.

Kemudian jika dilihat dari segi umur pegawai, semua pegawai masih berada pada umur yang produktif yaitu pada umur 20-50 tahun. Sehingga responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini, sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Untuk indikator Penatausahaan Penerimaan kategori penilaian responden terhadap Penatausahaan penerimaan cukup baik. Maka oleh karena itu, untuk kedepannya pengelolaan keuangan desa Rantau Baru agar lebih ditingkatkan lagi.
2. Untuk indikator Penatausahaan Pengeluaran kategori penilaian responden terhadap Penatausahaan Pengeluaran cukup baik. Maka oleh karena itu, untuk kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi penatausahaan pengeluaran. Untuk apa saja pengeluaran anggaran yang digunakan agar dicatat dalam APBDes.

3. Untuk indikator pertanggungjawaban penggunaan dana kategori penilaian responden pegawai terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana cukup baik. Maka oleh karena itu, untuk kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi pertanggung jawaban penggunaan dana nya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan dana.

Saran

1. Sebaiknya Kepala Desa lebih mengontrol pekerjaan bendahara desa agar dalam pencatatan penggunaan anggaran desa tidak terjadi kesalahan lagi.
2. Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) agar memberikan pelatihan kepada bendahara desa mengenai pengelolaan keuangan desa.
3. Kepada Pemerintah Desa Rantau Baru agar lebih transparan kepada masyarakat mengenai keuangan desa.
4. Sebaiknya Pemerintah Desa Rantau Baru agar lebih meningkatkan pendapatan desanya melalui pendapatan asli desa (PADes). Desa Rantau Baru mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui wisata pancing. Karena setiap hari ada puluhan kendaraan yang masuk ke desa Rantau Baru untuk mancing ikan. Apabila wisata pancing dikelola dengan baik tentu akan meningkatkan pendapatan asli desa dan bukan tidak mungkin dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selama ini pemerintah desa Rantau Baru hanya mengharapakan dana yang turun dari kabupaten maupun dari provinsi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Brantas.2009.*Manajemen*.Bandung:
Alfabet
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ajdi Mahasatya.
- Hamim, Sufian dan Indra Mukhlis, 2005. *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen (Studi Ilmu Teori Konsep Dan Aplikasi)*. Bandung: Multi Grafindo.
- Handoko, Hani T, 2003.*Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Safri, 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi, 2002.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Kartono, Kartini. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kencana, Inu Syafie, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Munandar, 2000.*Budgeting :Perencanaan, Pengkoordinasian, danPengawasanKerja*, Edisi I, Yogyakarta: BPFE.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ragawino Bewa, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Universitas Padjadjaran Pers.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Siagian, Sondang P. 2003. *FilsafatAdministrasi*. Jakarta:BumiAksara.
- Siagian, SondangP. 2003. *TeoridanPraktekKepemimpinan*. Jakarta: RinekaCipta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alfabeta.
- Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Prenada Media.
- Sumaryadi Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Suyanto, Bagong Dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Bumi aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta: Bintang Pustaka.